

Pada masa orde baru, kekuasaan memegang peranan penting dalam pembentukan wacana. Wacana tentang pembangunan dan peningkatan gizi menjadi wacana yang disebarluaskan lewat berbagai instansi pemerintahan dan media. Struktur wacana tersebut dibangun dan dibentuk lewat bangunan wacana yang kokoh. Disisi lain, pengetahuan menyeluruh tentang sistem pemerintahan orde baru menjadi terpinggirkan.

c) Produksi wacana

Realitas dapat dibentuk dan di produksi melalui berbagai wacana yang saling mendukung. Wacana-wacana tersebut menjadi sebuah pengetahuan umum yang dikonsumsi publik. Bangunan wacana tersebut membatasi cara pandang kita tentang sesuatu, sehingga pengetahuan umum yang disebarkan dalam berbagai aspek pengetahuan yang saling melengkapi dapat menggambarkan realitas yang diterima oleh publik

Struktur diskursif menentukan pandangan kita terhadap suatu objek dalam batasan-batasan tertentu. Batasan bidang wacana menentukan pandangan kita tentang realitas sesuatu. Pikiran kita menerima realitas yang dibentuk dari struktur wacana melalui serangkaian perspektif. Definisi tentang suatu objek diterjemahkan dibatasi oleh suatu praktik wacana.¹⁵

Sebagai contoh, wacana tentang iklan memberikan sudut pandang tertentu pada sebuah objek (produk). Pembaca diarahkan kepada diskursif tertentu yang telah dibatasi oleh pembuat iklan. Sehingga pandangan kita tentang sebuah produk melahirkan realitas yang berada dalam pikiran kita. Struktur diskursif pada sebuah wacana iklan tidak mungkin memberikan segala informasi secara menyeluruh tentang suatu produk. Pembatasan wacana tersebut bertujuan untuk mengarahkan pandangan pembaca sehingga membentuk suatu realitas dalam pikiran yang mengarahkan pembaca untuk mengkonsumsi suatu produk.

d) Wacana terpinggirkan

Menurut Foucault, konsep tentang benar dan salah bukanlah sesuatu konsep yang ada dengan sendirinya. Konsep tersebut dibentuk dan diwacanakan dalam berbagai bidang yang saling berkaitan dan saling mendukung. Peran kuasa menguatkan salah satu wacana tersebut dan menyebarkan berbagai wacana yang mendukung dalam berbagai bidang seperti media, ilmu

kedokteran, psikologi dan berbagai ilmu yang lain. Wacana yang didukung menjadi wacana yang dominan. Sedangkan, wacana-wacana yang lain menjadi terpinggirkan.¹⁶

Wacana yang dominan membawa kepada konsekuensi bahwa pengetahuan dibatasi dalam wacana-wacana tertentu, sehingga wacana-wacana yang lebih luas menjadi seolah-olah tidak terpikirkan dan terhalang. Struktur wacana membatasi pengetahuan dan membentuk kebenaran sesuai dengan wacana yang dibangun.¹⁷

C. Relasi Kuasa dan Pengetahuan dalam Konteks Pilgub DKI 2017

Menurut Foucault, kuasa dan pengetahuan merupakan dua keping mata uang yang tidak terpisahkan. Kuasa membentuk pengetahuan dan pengetahuan memproduksi kuasa. Agama sendiri memuat berbagai konsep pengetahuan. Agama sebagai pengetahuan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Agama menimbulkan suatu tatanan masyarakat sesuai dengan pemahaman masyarakat tersebut tentang agama. Agama juga memunculkan organisasi-organisasi kemasyarakatan baik dalam lingkup kecil maupun lingkup besar. Organisasi dalam lingkup kecil seperti jamaah pengajian, dan panti asuhan. Organisasi dalam lingkup menengah seperti ormas-ormas Islam di Indonesia. Organisasi dalam lingkup besar seperti kekhalifahan dalam sejarah peradaban Islam, dan negara-negara berbasis Islam dan awal terbentuknya karena pemahaman masyarakatnya tentang Islam seperti Arab Saudi dan Iran.

Di sisi lain, kuasa dengan sengaja atau tidak sengaja memproduksi pengetahuan yang mendisiplinkan tubuhnya sendiri. Misalnya, sebuah negara dengan dasar dan asas negara tertentu secara langsung maupun tidak langsung membentuk pengetahuan yang tertuang dalam berbagai institusi sesuai dengan dasar negara. Negara komunis tentu akan menyuarakan berbagai macam pengetahuan dan informasi yang mendukung landasan negara tersebut. Pengetahuan tersebut tereproduksi secara teratur dan sistematis dalam berbagai bidang.

Kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dimulai dari pidatonya di kepulauan seribu pada tanggal 27 September 2016. Ia menyinggung tentang al-Maidah ayat 51. Artikel ini tidak akan membahas

secara khusus segi linguistik dari perkataan sang gubernur. Akan tetapi wacana yang dibangun dalam polemik ini akan dibahas dalam bahasan selanjutnya.

Bagian ini akan dibahas bagaimana pola hubungan kekuasaan dan pengetahuan bekerja pada kasus ini. Ketika potongan video ini diunggah dalam sebuah media sosial, hal ini menimbulkan gejolak dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam. Pengetahuan yang tertanam dalam masyarakat Islam merespon informasi baru ini dengan berbagai cara. Di sinilah pengetahuan mulai memproduksi kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini salah satunya berbentuk pelaporan. Setidaknya ada tiga pelaporan di awal kasus ini. Laporan dari perorangan diajukan oleh Habib Novel Chaidir Hasan dengan nomor surat tanda bukti lapor TBL/705/X/2016 tertanggal 6 Oktober 2016. Selain itu ada dua ormas yang juga mengajukan laporan yaitu dari Pemuda Muhammadiyah yang menggunakan nama Forum Anti Penistaan Agama (FUPA) dan MUI Sumsel.¹⁸

Sejak awal, resistensi sebagai bentuk reaksi perlawanan terhadap dominasi penguasa sudah muncul atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama saat menjabat. Permasalahan yang paling tampak adalah masalah reklamasi teluk Jakarta yang dianggap sarat dengan kepentingan kelas borjuis asing dan banyak merugikan warga Jakarta baik secara ekonomi, sosial, moral, maupun lingkungan. Ada juga beberapa kebijakan yang dianggap mendiskreditkan masyarakat Islam Jakarta. Diakui atau tidak, kasus ini merupakan bagian dari rentetan benturan antara penguasa dan *civil society* yang secara khusus adalah masyarakat Islam.

Resistensi sebelum kasus ini mencuat bersifat individual dan tidak sistematis (*hidden transcript*). Akan tetapi, setelah kasus ini, resistensi mulai mengarah pada *public transcript* yang ditandai dengan gerakan yang sistematis dan kooperatif meskipun tidak sampai pada tahap revolusi dan hanya menuntut kasus ini ditangani secara hukum.¹⁹ Perubahan arah resistensi merupakan buah dari pertentangan antara pengetahuan lama dalam hal ini keyakinan masyarakat Islam dan wacana baru yang digulirkan oleh gubernur Basuki.

Pengetahuan dalam bentuk keyakinan masyarakat Islam yang sudah bertahun-tahun mendarah daging mempunyai kekuasaan yang luar biasa dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia. Kekuasaan inilah yang dulu digunakan untuk melawan penjajah yang berusaha mendominasi bangsa Indonesia secara fisik. Pengetahuan ini menimbulkan efek kekuasaan besar yang menggerakkan masyarakat Islam baik berupa organisasi, lembaga, maupun institusi-institusi berbasis Islam. Di sinilah bekerja teori relasi kekuasaan Foucault bahwa pengetahuan memproduksi kekuasaan. Puncaknya adalah runtutan aksi massa

masyarakat Islam dari berbagai daerah seluruh Indonesia ke Jakarta dengan tuntutan hukum kepada gubernur Basuki Tjahaya Purnama. Aksi pertama ini dimulai dari aksi 212 yang didatangi oleh berbagai elemen masyarakat Islam seluruh Indonesia baik atas nama individu, institusi maupun lembaga pada tanggal 2 Desember 2016.

Kekuatan massa masyarakat Islam ini sulit dibendung bahkan oleh kekuatan represif pemerintah. Aksi damai masyarakat Islam sebagai *civil society* dan bagian masyarakat Indonesia merupakan kekuasaan represif secara halus hasil produksi pengetahuan yang menggerakkan masyarakat secara bersama-sama. Aksi ini tidak dapat dihentikan dengan penangkapan apa yang disebut dengan aktor intelektual, karena sumber kekuatan bukan dari wacana yang dibangun secara spontan tetapi hasil dari pengetahuan yang sudah lama ada pada masyarakat Islam.

Sebagai subjek pemegang kekuasaan pemerintahan, Basuki Tjahaya Purnama yang masih menjabat gubernur mempunyai kepentingan untuk tetap menjaga tubuh sosialnya. Proses untuk mempertahankan kekuasaan ada dua cara menurut Gramsci yaitu dominasi dan hegemoni. Dominasi adalah proses kekuasaan secara langsung melalui proses fisik. Proses ini jelas tidak mungkin ditempuh dengan pertimbangan sistem demokrasi Indonesia dan ketertiban negara. Sehingga proses yang kedualah yang dipilih yaitu model hegemoni. Hegemoni merupakan proses kekuasaan yang bekerja dengan produksi wacana/non fisik.²⁰

Cara hegemoni ini ditempuh salah satunya dengan produksi wacana sebagai usaha untuk mempertahankan kekuasaan politik.²¹ Wacana yang dibangun dalam hal ini adalah wacana tentang kebhinekaan. Kebhinekaan dirancang sebagai sebuah diskursus pengetahuan. Diskursus ini disebarakan melalui berbagai media bahkan institusi pemerintahan sebagai proses pendisiplinan tubuh sosial.²² Kebhinekaan oleh kubu gubernur basuki diberi makna tertentu sebagai sesuatu yang anti rasisme dan anti radikal.²³

Disisi lain, sebagai oposisi dalam pertarungan hegemonik, masyarakat Islam sebagai *civil socociety* mencoba memberi penekanan makna pada kata kebhinekaan yang berbeda dengan wacana kubu gubernur Basuki. Media sosial memiliki peranan penting dalam kontestasi wacana ini. Ia menjadi wadah bagi diskusi sosial dalam memenangkan wacana yang dominan. Menurut Laclau dan Mouffle, wacana adalah kontestasi pemberian makna oleh berbagai individu atau kelompok sosial pada penanda yang mengambang *floating signifier*. Isu

kebhinekaan menjadi *floating signifier* yang diperebutkan dalam kontestasi wacana yang dominan dan tidak dominan.²⁴

D. Wali dan Kebhinekaan dalam Wacana Politik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diskusi publik merupakan ajang pertarungan pemberian makna pada *floating signifier* untuk memperebutkan wacana yang dominan. Dalam kasus pertarungan hegemonik ini, *floating signifier* yang pertama adalah kata *auliya*' dalam surat al-Maidah ayat 51. Hal ini sempat menjadi diskusi yang panas ketika memperdebatkan makna dari kata *auliya*' dalam surat al-Maidah ayat 51 ini. Pasalnya, kubu gubernur Basuki Tjahaya Purnama menyatakan bahwa yang dimaksud dibohongi bukan al-Maidah secara langsung tetapi oknum yang menyatakan tafsir dari kata *auliya*' di sini adalah pemimpin. Sehingga dalam Islam, ada larangan memilih pemimpin dari golongan non muslim. Kubu gubernur menyangkal bahwa maksud dari *auliya*' adalah teman setia bukan pemimpin.

Disisi lain, masyarakat Islam menyatakan bahwa *auliya*' bermakna pemimpin sehingga memang ada larangan untuk memilih pemimpin dari kalangan non muslim. Perdebatan ini berkembang sedemikian rupa hingga masuk ke ranah persidangan. Mayoritas masyarakat Muslim menolak teman setia sebagai makna dari kata *auliya*' dalam surat al-Maidah ayat 51 ini. Akan tetapi, beberapa menyatakan bahwa kata *auliya*' dalam al-Quran bermakna teman setia memang benar, tetapi pemimpin mempunyai hubungan lebih tinggi dari teman setia, sehingga tetap saja pemimpin non muslim lebih masuk dalam kategori *auliya*'.

Kata *Auliya*' dalam bahasa Arab berasal dari kata *wali*. *Auliya*' adalah jamak (plural) dari kata *wali*. Kata *wali* pada dasarnya bermakna penolong yang dapat diamanahi urusan seseorang.²⁵ Dalam konteks al-Quran, *al-Wali* yang sesungguhnya (*al-Haqq*) adalah Allah yang memegang kendali dunia dan akhirat.²⁶ Dalam konteks muamalah kekerabatan, *wali* merupakan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat diamanahi untuk menjalankan urusan seseorang yang menjadi tanggungan *wali* tersebut, misalnya ayah adalah *wali* dari anaknya.²⁷ Dalam konteks hubungan dengan manusia lain, *wali* adalah orang yang dapat dipercaya untuk membantu atau disertai urusannya. Oleh karena itu, *wali* di sini mempunyai hubungan yang dekat dengan orang yang menjadikannya *wali* serta dapat dipercaya dan tidak mengkhianatinya.²⁸ Dalam konteks ini, banyak makna yang dapat masuk seperti teman setia dan pemimpin. Sehingga sebenarnya keduanya masuk dalam kategori *wali* (*auliya*').

Kedua makna berkompetisi untuk memenangkan konsep *wali* sehingga salah satu menjadi wacana/makna yang dominan. Padahal, kata *wali* mencakup kedua makna tersebut bahkan lebih luas.

Kebhinekaan adalah Isu kedua yang diperdebatkan setelah kata *wali*. Kubu gubernur mencoba memaknai kebhinekaan sebagai anti radikalisme dan rasisme. Makna ini ditarik pada konteks aksi massa masyarakat Islam yang berturut-turut. Tindakan ini dimaknai sebagai perbuatan rasis yang dapat memecah belah kebhinekaan Indonesia.

Masyarakat Islam berusaha memaknai kebhinekaan sebagai persatuan dan toleransi terhadap keberagaman. Hal-hal yang dapat merusak persatuan dan keberagaman merupakan anti-kebhinekaan. Makna ini ditarik dalam konteks pernyataan Basuki yang bagi sebagian besar masyarakat Islam adalah penistaan agama yang merupakan perbuatan rasis yang dapat merusak kebhinekaan. Aksi yang dilakukan masyarakat Islam bagi mereka bukanlah aksi rasis tetapi aksi tuntutan kepada hal-hal yang merusak persatuan.

Bhineka pada dasarnya bermakna keberagaman (KBBI). Kebhinekaan merupakan reduksi dari konsep Bineka Tunggal Ika yang menjadi bagian simbol negara Indonesia yang ada dalam lambang pancasila. Makna Bhineka Tunggal Ika adalah kesatuan dalam keberagaman yang merupakan sebuah ide persatuan bangsa Indonesia.²⁹ Hal ini mencakup toleransi terhadap keberagaman agama, suku dan budaya yang beragam di Indonesia. Makna ini juga mencakup anti rasisme dan sikap intoleran terhadap keberagaman yang dapat merusak persatuan. Kedua makna yang dimaksudkan oleh dua pertarungan hegemonik tadi tercakup semua dalam makna Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi, makna tersebut *diframing* dalam dua sumbu. Pertama, anti-keberagaman, kedua, toleransi terhadap keberagaman. Dua sumbu positif dan negatif yang sebenarnya sama tetapi berbeda karena dikontekstualisasikan dalam konteks tertentu.

E. Kesimpulan

Pengetahuan dan kuasa bekerja bagai dua sisi keping mata uang. Keduanya tidak terpisahkan. Kuasa memproduksi pengetahuan, begitu juga pengetahuan mempunyai efek kekuasaan. Inilah inti dari teori relasi kekuasaan dan pengetahuan Foucault.

Dalam konteks kasus gubernur jakarta Basuki Tjahaya Purnama, pengetahuan dalam bentuk agama yang ada dalam keyakinan masyarakat Islam memproduksi kekuasaan dalam bentuk resistensi atas dominasi preventif perihal

wacana keagamaan. resistensi ini berwujud aksi masa yang menuntut proses hukum kepada gubernur Basuki.

Hegemoni dalam bentuk dominasi wacana merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani resistensi ini. Pertarungan hegemonik dalam diskusi sosial menjadi isu yang hangat pada masa-masa pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Kasus ini sedikit banyak mempengaruhi elektabilitas Basuki Tjahaya Purnama dalam pemilihan pilgub DKI Jakarta 2017. Hasilnya ia tidak terpilih dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dalam persidangan.

Pertarungan wacana dan pemanfaatan ilmu pengetahuan menjadi pertarungan abad modern yang merupakan zaman teknologi informasi. Media sosial menempati posisi penting dalam proses pertarungan hegemoni ini. Penelitian ini hanya berfokus pada kasus pilgub DKI Jakarta yang sempat menjadi isu nasional bahkan internasional. Penelitian serupa bisa dilakukan dengan analisis yang lebih kompleks dan objek yang lebih beragam.

Endnotes:

¹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 77.

² Michel Foucault, *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*, (Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002), Hal. 175.

³ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 297.

⁴ A. Khozin Afandi, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault. Teosofi: Jurnal Tasawwuf dan Pemikiran Islam". Vol 01. No. 02. (Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya:Desember 2011), hal. 134.

⁵ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, hal. 297-299.

⁶ *Ibid.*, hal. 299-300.

⁷ A. Khozin Afandi, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault. Teosofi: Jurnal Tasawwuf dan Pemikiran Islam", hal. 136.

⁸ *Ibid.*, hal. 136.

⁹ *Ibid.*, hal. 137.

¹⁰ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, hal. 318-319.

¹¹ *Ibid.*, hal. 322-323

¹² *Ibid.*, hal. 321-322.

¹³ *Ibid.*, hal. 320-321.

¹⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, hal. 70.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 73-74.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 76-77.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 77.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/08/oepea9377-ramairamai-laporkan-ahok-ke-polisi>, diunduh tanggal 24 Mei 2017, pukul 22:08.

¹⁹ James C. Scott, *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcripts*, (London: Yale University Press New Haven and London, 1990), hal. 1-5.

²⁰ Antonio Gramsci, *Selections From Prison Notebooks*, (London: Lawrence and Wishart, 1986), hal. 71

²¹ Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democratic Politics* (London: Verso, 2001), hal .134-137.

²² <https://news.detik.com/berita/d-3383598/kapolri-ingatkan-ancaman-kebhinekaan-dan-bicara-isu-tka-ilegal>, diunduh pada tanggal 26 Mei 2017, Pukul 21.45.

²³<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/16/18061611/gerakan.antropolog.serukan.darurat.kebhinekaan>, diunduh pada tanggal 26 Mei 2017, Pukul 22.00.

²⁴ Amir Dabirimehr, dan Malihe Tabatabai Fatmi, "Laclau and Mouffe's Theory of Discourse, Journal of Novel Applied Sciences", (Department of Political Science , Zahedan branch, Islamic Azad university, Zahedan, Iran: 11 Maret 2014), hal. 1284.

²⁵ Mu'jam alfadhil quran. Hal. 1208.

²⁶ Q.S. Al Baqarah ayat: 108, Q.S. al A'raf ayat 155. al Kahfi ayat 44.

²⁷ Q.S. Al isra' ayat 33.

²⁸ Q.S. al Baqarah ayat 282, Q.S. Fushshilat ayat 34, Q.S. al ahzab ayat 6, Q.S. an Nisa ayat 75.

²⁹ H. Darmawan M Rahman, dkk. *Makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai Perekat Kembali Budaya Ke-Indonesia-an*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2010. hal. 8.

Daftar Pustaka

- Afandi, A. Khozin. “Konsep Kekuasaan Michel Foucault. Teosofi: Jurnal Tasawwuf dan Pemikiran Islam”. Volume 01. No. 02. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya: Desember 2011.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia. 2001.
- Dabirimehr, Amir, dan Malihe Tabatabai Fatmi, “Laclau and Mouffe’s Theory of Discourse, Journal of Novel Applied Sciences”, Department of Political Science , Zahedan branch, Islamic Azad university, Zahedan, Iran: 11 Maret 2014.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2003
- Faiz, Fahrudin. “Mihnah Mu’tazilah dalam perspektif teori relasi kuasa Michel Foucault”. Laporan Penelitian. LPPM UIN Sunan Kalijaga: 2013.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bintang Budaya. 2002.
- Gramsci, Antonio. *Selections From Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart. 1986.
- Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards A Radical Democrtic Politics*. London: Verso. 2001.
- Rahman, H. Darmawan M, dkk. *Makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai Perekat Kembali Budaya Ke-Indonesia-an*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 2010.
- Scott, James ., *Domination and the Art of Resistance: Hidden Trancripts*. London: Yale University Press New Haven and London. 1990.

WEB

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/08/oepea9377-ramairamai-laporkan-ahok-ke-polisi>, diunduh tanggal 24 Mei 2017, pukul 22:08.

<https://news.detik.com/berita/d-3383598/kapolri-ingatkan-ancaman-kebhinekaan-dan-bicara-isu-tka-ilegal>, diunduh pada tanggal 26 Mei 2017, Pukul 21.45.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/16/18061611/gerakan.antropolog.serukan.darurat.kebinekaan>, diunduh pada tanggal 26 Mei 2017, Pukul 22.00.